BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.1.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun pengertian sistem akuntansi keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim (2014:83) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah:

> "Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer".

Dan menurut menurut Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dalam Erlina, Omar Sakti, dan Rasdianto (2015:5) bahwa sistem akuntansi keuangan adalah:

> "Sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan, transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan pelaporan suatu transaksi ekonomi dalam pelaksanaan APBD yang

dilaksanaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.1.1.2 Tujuan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Adapun tujuan dari akuntansi pemerintahan menurut Nurlan Darise (2008:28) mengatakan bahwa tujuan akuntansi pemerintahan adalah:

1. Pertanggungjawaban
   Memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan.
2. Manajerial
   Akuntansi pemerintah harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah.
3. Pengawasan
   Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

2.1.1.3 Sistem Pencatatan

Menurut Erlina Rasdianto (2015:4) mengatakan bahwa akuntansi keuangan daerah terdapat proses pencatatan, pengidentifikasian, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) dalam proses pencatatan yang merupakan salah satu proses akuntansi, akuntansi menggunakan sistem pencatatan.Menurut Erlina Rasdianto (2013:4) Ada tiga sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu:

1. *Single entry*
2. *Double entry*

3. *Triple entry*

Adapun penjelasan sistem pencatatan yaitu sebagai berikut:

1. *Single Entry*
   Sistem pencatatan single entry disebut dengan sistem tata buku tunggal. Pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transasksi yang berakibat ditambahkannya kas akan dicatat disisi penerimaan di dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat kurangnnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam Buku Kas Umum. Single entry ini disebut dengan pembukuan, sedangkan dalam akuntansi sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem double entry atau triple entry.
2. *Double Entry*
   Sistem pencatatan double entry disebut sistem tata buku berpasangan. Pencatatan transaksi ekonomi dua kali, dalam arti, bahwa setiap transaksi minimal akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi. Pencatatan dengan sistem double entry sering disebut dengan istilah menjurnal. Pada masa sebelum reformasi, sistem pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (single entry). Tetapi setelah reformasi yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105/2000, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry.
3. *Triple Entry*
   Sistem pencatatan triple entry adalah sistem pencatatan yang menggunakan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Pencatatan pada buku anggaran ini merupakan pencatatan tentang anggaran yang telah digunakan sesuai dengan pencatatan pada double entry. Dengan adanya pencatatan ini maka dapat dilihat sisa anggaran untuk masing-masing komponen yang ada di anggaran pendapatan belanja daerah. Pencatatan dengan sistem triple entry ini dilaksanakan saat pencatatan double entry dilaksanakan, maka sub bagian keuangan pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran.Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (*double entry*) artinya bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, yaitu disisi debit dan satu disisi kredit.

2.1.1.4 Basis Akuntansi Pemerintahan

Dalam proses pencatatan dibutuhkan basis akuntansi dalam menentukan kapan transaksi atau kejadian harus diakui. Basis akuntansi pada umumnya ada dua yaitu basis kas dan basis akrual.

Menurut Nurlan Darise (2008:38) mengemukakan bahwa:

> "Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan".

Adapun basis akuntansi pemerintahan Menurut Erlina Rasdianto (2013:10) terdiri dari tiga basis yaitu:

1. Akuntansi berbasis kas
2. Akuntansi berbasis akrual
3. Akuntansi kas menuju akrual

Adapun penjelasan basis akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Akuntansi berbasis kas
   Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggungjawaban kas saja, tetapi tidak

memperlihatkan pertanggungjawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban.

2. Akuntansi berbasis akrual
   Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan. Fokus sistem akuntansi ini pada pengukuran sumber daya ekonomis dan perubahan sumber daya pada suatu entitas. Dalam akuntansi akrual informasi yang dihasilkan jauh lebih lengkap dan menyediakan informasi yang lebih rinci mengenai aktiva dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, telah mewajibkan laporan keuangan pemerintah menggunakan basis akrual, sedangkan Peraturan Pemerintah Republik 20 Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan masih menggunakan basis akuntansi kas menuju akrual.
3. Akuntansi berbasis kas menuju akrual
   Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa saat ini penyusunan laporan keuangan pada pemerintah daerah wajib menggunakan basis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.1.5 Siklus Akuntansi

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengatakan akuntansi adalah suatu sistem, suatu sistem mengelola input (masukan) dan menjadi output (keluaran). Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Outpunya adalah laporan keuangan.

Menurut Erlina Rasdianto (2013:6) mengemukakan bahwa:

"Sistem akuntansi keuangan daerah dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan yang ada dalam sistem akuntansi".

Sementara menurut Nurlan Darise (2008:41) mengemukakan bahwa:

"Untuk dapat memahami penyusunan laporan keuangan harus terlebih dahulu memahami siklus akuntansi".

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa siklus akuntansi terdiri dari tahap-tahapan dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun tahap-tahap siklus akuntansi pemerintahan menurut Erlina Rasdianto (2013:6) sebagai berikut:

1. Dokumentasi transaksi keuangan dalam bukti dan melakukan analisis transaksi keuangan tersebut.
2. Pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal.
3. Meringkas (mem-posting) transaksi keuangan yang telah dijurnal dalam buku besar.
4. Menentukan saldo-saldo buku besar di akhir periode dan memindah-kan saldo-saldo buku besar neraca saldo.
5. Melakukan penyesuaian buku besar pada informasi yang paling up to date.
6. Menentukan saldo buku besar setelah disesuaikan.
7. Menyusun laporan keuangan.
8. Menutup buku besar.
9. Menentukan saldo buku besar dan menuangkan dalam neraca saldo setelah tutup buku.

2.1.1.6 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Indikator sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Pasal 232 ayat (3) Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Abdul Halim (2014:83), bahwa sistem akuntansi keuangan daerah

merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan
   Menurut Abdul Halim (2014:44) pencatatan adalah pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada.
2. Pengidentifikasian (Penggolongan)
   Menurut Abdul Halim (2014:44) pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.
3. Pelaporan
   Menurut Abdul Halim (2014:44) pelaporan adalah transaksi ekonomi menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

2.1.2.1 Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Adapun pengertian anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:202) Anggaran Berbasis Kinerja adalah:

> "Sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, serta rencana strategis organisasi. *Performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran *output (output measurement*)".

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:43) mengartikan Anggaran Berbasis Kinerja merupakan:

> "Memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja. Hal ini akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah".

Kemudian menurut Mahmudi (2010:158) menjelaskan mengenai pengertian anggaran berbasis kinerja yaitu:

> "Sistem yang mencakup kegiatan penyusunan dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi, dan renacana strategis organisasi, sehingga dapat memberikan informasi tentang efesiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah".

2.1.2.2 Fungsi dan Kegunaan Anggaran

Menurut Munandar (2010:10), anggaran mempunyai tiga fungsi dan kegunaan pokok yaitu:

1. Sebagai pedoman kerja.
2. Sebagai alat pengkoordinasiaan kerja.
3. Sebagai alat evaluasi (pengawasan) kerja.

Adapun penjelasan fungsi dan kegunaan anggaran yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman Kerja. Anggaran sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan tugas dan target – target yang harus dicapai oleh para karyawan dalam jangka waktu tertentu yang akan datang.
2. Sebagai alat pengkoordinasiaan kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk mengkoordinasikan kerja seluruh bagian dalam perusahaan, agar saling menunjang, saling bekerja sama secara sinergis, dalam rangka menuju sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan menjadi lebih terjamin.
3. Sebagai alat evaluasi (pengawasan) kerja. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Ini berarti bahwa anggaran anggaran berfungsi sebagai alat manajemen untuk menilai kinerja para karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah dibebankan kepada mereka. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran, dengan apa yang telah dicapai oleh realisasi kerja karyawan, dapat menilai apakah perusahaan telah bekerja secara efisien, ataukah bekerja kurang efisien. Dari analisis perbandingan tersebut akan dapat diketahui pula sebab-sebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Dengan demikian dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatankekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan sangat berguna bagi manajemen untuk menyusun rencana-rencana atau kebijakan-kebijakan di waktu-waktu yang akan datang.

2.1.2.3 Indikator Anggaran Berbasis Kinerja

Indikator anggaran berbasis kinerja dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Mahmudi (2010:159) bahwa ada beberapa tahapan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Perumusan Startegi
2. Perencanaan Strategi
3. Penyusunan Program
4. Penganggaran
5. Implementasi
6. Pelaporan Kinerja
7. Evaluasi Kinerja
8. Umpan Balik

Adapun penjelasan dari indikator di atas:

1. Perumusan Strategi
   Tahap perumusan strategi merupakan tahap penting dalam proses pengendalian organisasi, karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat kesalahn arah organisasi. Penentuan arah dan tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi, organisasi merumuskan misi, visi, dan tujuan organisasi. Perumusan strategi merupakan kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa depan (*creating the future*).
   a. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana intansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, motivasi, serta produktif.
   b. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah yang harus diembankan atau dilaksankan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pertanyaan misi yang diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara.
2. Perencanaan Strategi
   Perencanaan strategi adalah penetapan program-program, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Perbedaan dengan perumusan strategi adalah proses untuk menentukan strategi sedangkan perencanaan strategi adalah proses menentukan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Hasil dari perencanaan strategi berupa rencana strategi (*strategy plan*).
   a. Manfaat perencanaan strategi bagi organisasi, Mardiasmo (2009:51) adalah:
      - Sebagai sasaran untuk memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif;
      - Sebagai sasaran untuk memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan;
      - Sebagai sasaran untuk memfasilitasi dilakukan alokasi sumber daya;
      - Sebagai kerangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek (*short term action*);
      - Sebagai sarana bagi manajemen untuk dapat memahami strategi organisasi secara lebih jelas; dan
      - Sebagai alat memperkecil rentan alternative strategi.

b. Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antar manajer puncak dengan manajer level bawah. Adanya komunikasi ini akan memungkinkan terjadi persetujuan antara manager puncak dengan manajer level bawah mengenai terbaik untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan.

3. Penyusunan Program

Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan strategi. Rencana-rencana, sasaran strategi, dan insentif strategi merupakan konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategi tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya. Kriteria penyusunan program menurut MacMillan dalam Mahmudi, 2010:142 adalah:

a. Kesesuaian (*fit*) yakni dinilai dari: (1) sesuai dengan tujuan dan misi organisasi, (2) kemampuan untuk bisa menggunakan keahlian (*skill*) yang saat ini dimiliki atau pada organisasi, dan (3) kemampuan sumberdaya yang tersedia dan adanya keselarasan aktivitas dengan program.
b. Kemenarikan program (*attractiveness*), yakni tingkatan di mana program-program yang dilakukan menarik bagi organisasi dilihat dari prespektif ekonomi.
c. Cakupan pilihan (*alternative coverage*), yakni keluasan pilihan program atas suatu pelayanan diberikan organisasi lain.
d. Posisi bersaing (*competitive position*), yakni kemampuan organisasi dalam melaksanakan program dibandingkan dengan organisasi lain.

4. Penganggaran

Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. Biaya program tersebut merupakan gabungan dari biaya aktivitas untuk melaksanakan program. Secara seluruh program tersebut akan diringkas dalam bentuk anggaran. Selain anggaran biaya, juga dibuat anggaran pendapatan, dan anggaran investasi (modal) untuk pelaksanaan program.

Menurut Mardiasmo (2004) penganggaran adalah:

“untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah perlu dikembangkan standar analisis biaya, tolak ukur kinerja, standar biaya”.

a. Standar analisis biaya adalah penelitian kewajaran atau beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja dalam satu tahun anggaran.
b. Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja yang ditetapkan dalam bentuk standar pelayanan oleh masing-masing daerah.
c. Standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah, pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku di masing-masing daerah.

5. Implementasi

Selama tahap implementasi, pemimpin instansi bertanggung jawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atau penggunaan anggaran (*input*) dan outputnya dalam sistem akuntansi keuangan. Pemimpin instansi dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatkan pengendalian intern yang memadai.

Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan APBD berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan unsur pemerintahan daerah dicatat dan dikelola dalam APBD.
b. Setiap SKPD yang mempunyai tugas untuk memungut dan atau menerima pendapatan daerah wajib melaksankannya berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Perda.
c. Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.
d. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD, apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran membiayai pengeluaran tersebut.

6. Pelaporan Kinerja

Setelah tahap implementasi, informasi akuntansi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja finansial. Pelaporan kinerja yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi dilengkapi dengan kinerja non keuangan.

7. Evaluasi Kinerja
   Pelaporan kinerja organisasi harus memiliki dua manfaat utama yaitu bagi pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal, laporan kinerja manajer dan staf. Laporan kinerja, bagu manajer memungkinkan untuk membandingakan antara input dan output yang direncanakan dengan realisasinya. Bagi pihak eksternal, laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban organisasi. Laporan kinerja, bagi pemimpin instansi memungkinkan untuk membandingkan anatara ouput dan input yang direncanakan dan realisasinya. Jika terdapat penyimpangan yang signifikan, pimpinan instansi dapat melakukan tindakan koreksi sebagai umpan balik. Evaluasi kinerja meliputi:
   a. Evaluasi kinerja organisasi yaitu penilaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Penilaian ini dimaksud untuk menilai kinerja pemimpin pusat pertanggungjawaban.
   b. Evaluasi program yaitu menggunakan laporan kerja sebagai dasar untuk melakukan evaluasi program. Pelaksanaan program yang tidak optimal memerlukan revisi anggaran program, jika evaluasi program mewujudkan bahwa program yang dilakukan tidak efektif, maka pimpinan perlu mengkaji ulang terhadap strategi untuk mencapai tujuan atau bahkan untuk merevisi tujuan.

8. Umpan Balik
   Tahap terakhir setelah evaluasi kinerja adalah pemberian umpan balik (*feedback*). Tahap ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak lanjut (*follow up*) atas prestasi yang ingin dicapai. Apabila berdasarkan penilaian kinerja dinyatakan organisasi belum berhasil mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi yang ditetapkan, maka kemungkinkan perlu dilakukan penetapan ulang atas perumusan strategi organisasi.

2.1.3 Kinerja Pemerintah daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah daerah

Adapun pengertian kinerja pemerintah daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut Indra Bastian (2010:329) bahwa Kinerja (*performance*) adalah:

> "Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi".

Kemudian Menurut Chabib Soleh dan Suripto (2011:3) pengertian Kinerja adalah:

> "Gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis (*strategic planning*) suatu organisasi."

Dan menurut Mohamad Mahsun (2013:25) Kinerja Pemerintah Daerah adalah:

> "Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah merupakan gambaran tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi.

2.1.3.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan manajemen pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Pengukuran kinerja (Indra Bastian 2010:275) sebagai berikut:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati.
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan skema kerja serta malakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkap permasalahan yang terjadi.

2.1.3.3 Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

Indikator kinerja pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran menurut Mohamad Mahsun (2013:77), terdapat beberapa indikator yaitu:

1. Indikator Masukan (*Input*),
2. Indikator Proses (*Process*),
3. Indikator Keluaran (*Output*),
4. Indikator Hasil (*Outcomes*),
5. Indikator Manfaat (*Benefit*), dan
6. Indikator Dampak (*Impact*).

Adapun penjelasan dari jenis-jenis indikator diatas adalah:

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
   Misalnya:
   a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
   b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
   c. Jumlah infrastruktur yang ada.
   d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*Process)*. Dalam indikator ini, organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun

tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya:

a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.

3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya:
    a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
    b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk *output* memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak. Misalnya:
    a. Tingkat kualitas produk atau jasa yang dihasilkan.
    b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
5. Indikator manfaat (*Benefit*), adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Misalnya:
    a. Tingkat kepuasan masyarakat.
    b. Tingkat partisipasi masyarakat.
6. Indikator dampak (*Impact)*, pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:
    a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    b. Peningkatan pendapatan masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan intisari dari teori yang telah dikembangkan dan mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Berdasarkan telaah pustaka serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini

menjelaskan sistem akuntansi keuangan daerah dan anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pemerintah daerah.

2.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Usman dan Lukman (2014), menyatakan bahwa:

> "Dalam mengelola keuangan daerah yang baik dibutuhkan yang namanya sistem akuntansi yang mengatur keuangan daerah agar tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang baik. Dalam hal ini pemahaman sistem akuntansi berperan dalam kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah sekaligus mengukur kinerja pemerintah daerah".

Menurut Wawan dan Lia (2009), menyatakan bahwa:

> "Pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi keuangan tersebut hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja. Karena penilaian Pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja Pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik".

Menurut Mardiasmo (2009:35), menyatakan bahwa:

> "Organisasi sektor publik karena sifatnya yang tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politk yang besar. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efesiensi, dan efektivitas (*value for money*), akuntansi memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter".

Menurut Mardiasmo (2009:84) menyatakan bahwa:

> "Sistem akuntansi keuangan daerah berhubungan terhadap kinerja yang pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program untuk penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut".

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hidayat (2015) yang berjudul Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerntah daerah. Hasil studi ini menyatakan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh singnifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Molamahu (2015) yang berjudul Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerntah daerah. Hasil studi ini menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wawan Sukmana dan Lia Anggarsari (2009) yang berjudul Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil studi ini menyatakan bahwa pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2009) yang berjudul Model pengembangan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis partisipasi pengguna. Hasil studi ini menyatakan bahwa pengembangan sistem akuntansi pemerintahan daerah dan kesesuaian tugas teknologi sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penggunaan sistem akuntansi pemerintahan daerah untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.

2.2.2 Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:51) menyatakan bahwa:

"Kinerja eksekutif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja".

Menurut Mardiasmo (2009:40) menyatakan bahwa:

"Penyusunan APBD dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat".

Menurut Deddi Nordiawan (2007), menyatakan bahwa:

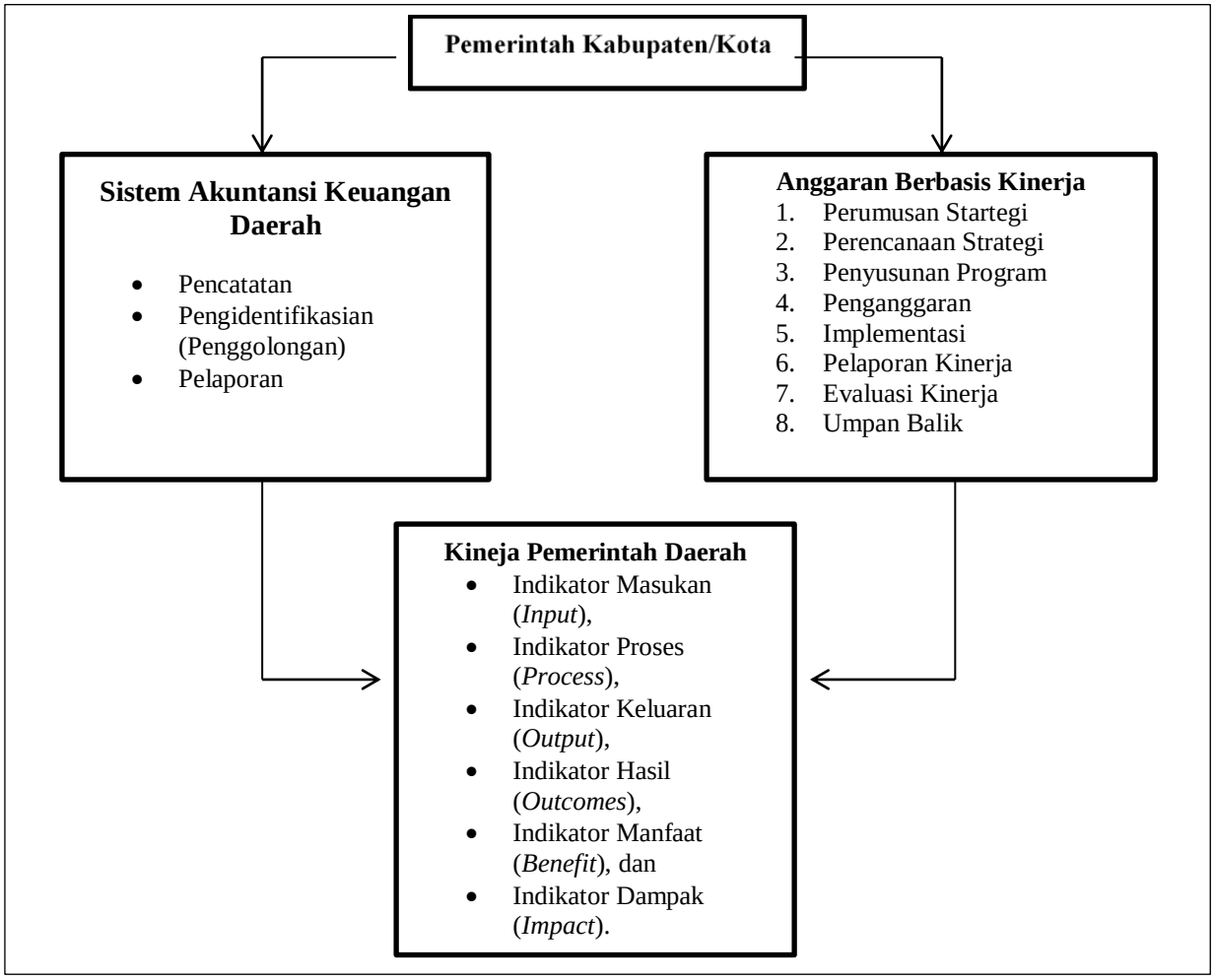
"Keuangan anggaran adalah sebagai alat penilaian kinerja, artinya anggaran merupakan suatu ukuran yang bisa menjadi patokan apakah suatu unit kerja telah memenuhi target, baik berupa terlaksananya aktifitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya".

Kemudian menurut penelitian Ika Dian Anugerahani dan Sentot Imam (2013) tentang pengaruh implementasi anggaran berbasis kinerja terhadap kinerja pegawai hasil penelitian ini menunjukan bahwa bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Dan menurut penelitian Rico Ales Sandra, dkk (2014) tentang pengaruh anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan *good goverment* tehadap penilaian

satuan kerja perangkat daerah bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap penilaian kinerja SKPD.

Penelitian Sem Paulus Silalahi (2012) yang berjudul anggaran berbasis kinerja, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terhadap penilaian satuan kerja perangkat daerah. Hasil studi ini menyatakan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja satuan kerja perangkat daerah.

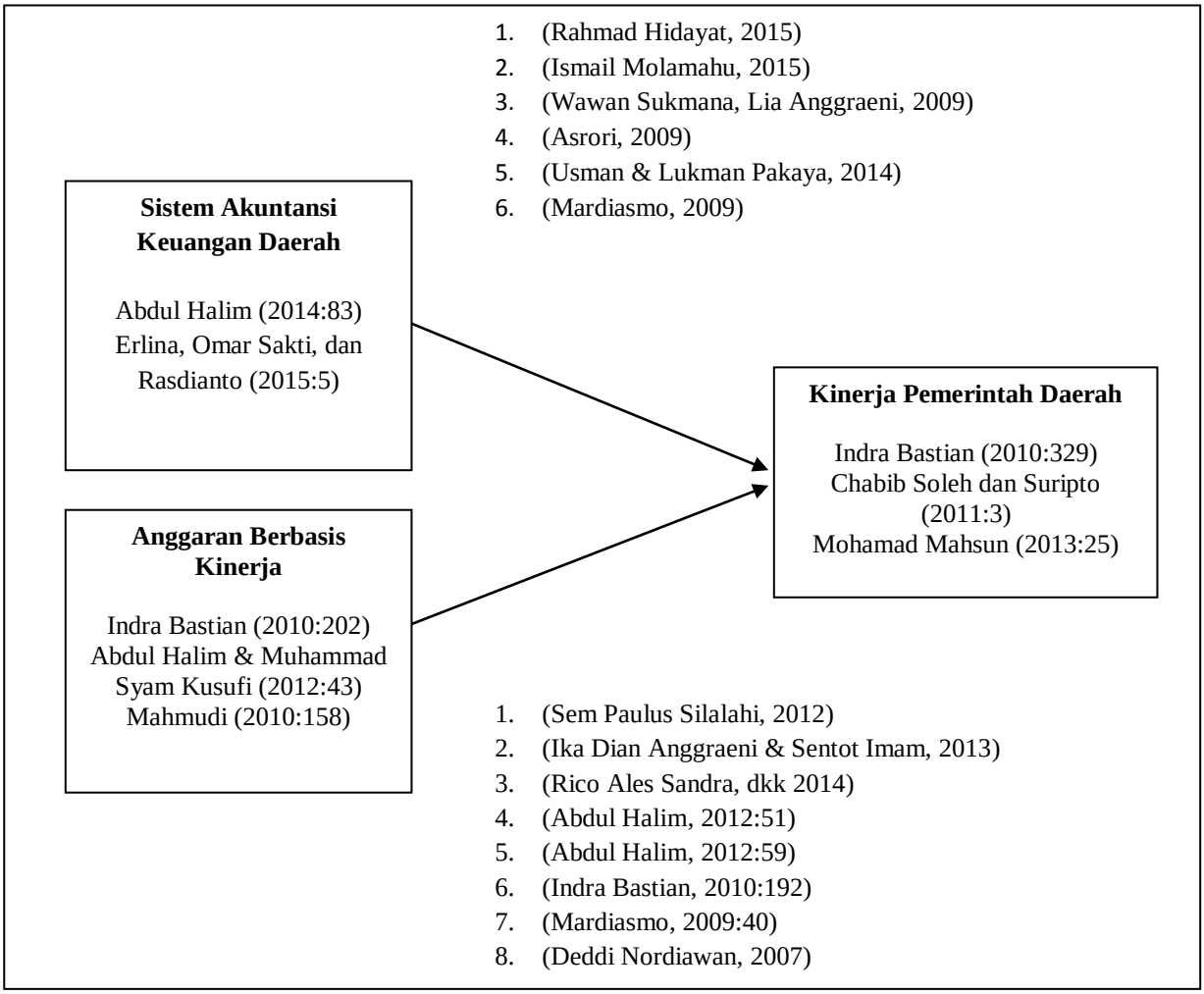


Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.3 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:42), paradigma penelitian adalah:

"Pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistic yang akan digunakan".



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Iskandar (2008:56), hipotesis adalah:

"Suatu pernyataan yang masih harus di uji kebenarannya secara empiris".

Menurut Sugiyono (2011:64), berpendapat bahwa hipotesis adalah:

"Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan penelitian telah dinyatakan dalm bentuk pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru

> didasarkan pada teori yang relevan, belum didasrkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empiris".

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai bukti melalui data yang terkumpul dan harus di uji secara empiris sehingga penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

H_1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.

H_2: Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Cimahi.